

SALINAN



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Batam, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4727));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1906);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 750) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Setelah Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

Penerbitan SKA oleh DPM PTSP dilaksanakan setelah ditetapkannya DPM PTSP sebagai Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan ditetapkannya Pejabat Penandatanganan SKA dilingkungan DPM PTSP oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 764

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 56 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 BATAM NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
 BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN WEWENANGNYA KE DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM

NO	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN – PER SEKTOR
SEKTOR PERHUBUNGAN	
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi
2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan
3.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Umum
4.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek
5.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Anak Sekolah
6.	Izin Usaha Khusus Perparkiran / Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija
7.	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas
8.	Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas
9.	Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
SEKTOR KESEHATAN	
1.	Izin Pendirian Rumah Sakit
2.	Izin Operasional Rumah Sakit
3.	Izin Operasional Puskesmas
4.	Izin Klinik Pratama
5.	Izin Klinik Utama
6.	Izin Operasional Optikal
7.	Izin Kesehatan Toko Obat
8.	Surat Izin Apotek
9.	Surat Izin Laboratorium
10.	Surat Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kategori Tertentu
11.	Surat Izin Tukang Gigi
12.	Surat Izin Toko Alat Kesehatan
13.	Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisionil
14.	Surat Izin Praktek Dokter
15.	Surat Izin Praktek Bidan
16.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional

17.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
18.	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
19.	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
20.	Surat Izin Praktek Radiografer (SIPR)
21.	Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO)
22.	Surat Izin Praktek Fisioterapis
23.	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
24.	Surat Izin Praktek Elektromedis
25.	Surat Izin Praktek Okupasi Terapis
26.	Surat Izin Praktek Ortosis Prostetis
27.	Surat Izin Penata Anastesi
28.	Surat Izin Perekam Medis
29.	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
30.	Surat Izin Praktek Terapis Wicara
31.	Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian
32.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Apoteker
33.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
34.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Perawat
35.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Radiografer
36.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien
37.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
38.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Fisioterapis
39.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
40.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Elektromedis
41.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Okupasi Terapis
42.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Tenaga Lingkungan
43.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Ortosis Prostetis
44.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Terapis Wicara
45.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
46.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Perekam Medis
47.	Rekomendasi Surat Izin Praktek Penata Anastesi
48.	Surat Keputusan Pencabutan SIP Apoteker
49.	Surat Keputusan Pencabutan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian
50.	Rekomendasi Surat Keputusan Pencabutan SIP Apoteker
51.	Rekomendasi Surat Keputusan Pencabutan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian
52.	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
53.	Rekomendasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

54.	Laik Sehat Jasa Boga / Cetering
55.	Laik Sehat Kantin / Rumah Makan / Restoran / Café / Kedai Kopi / Pujasera
56.	Laik Sehat Makan Jajanan
57.	Laik Sehat Hotel
58.	Laik Sehat Depot Air Minum
59.	Rekomendasi Laik Sehat Jasa Boga / Cetering
60.	Rekomendasi Laik Sehat Kantin / Rumah Makan / Restoran / Café / Kedai Kopi / Pujasera
61.	Rekomendasi Laik Sehat Makan Jajanan
62.	Rekomendasi Laik Sehat Hotel
63.	Rekomendasi Laik Sehat Depot Air Minum
SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
1.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri
4.	Izin Usaha Kawasan Industri
5.	Izin Usaha Industri
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan
7.	Surat Keterangan Asal (SKA)
SEKTOR KETENAGAKERJAAN	
1.	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA)
2.	Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK)
3.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
4.	Rekomendasi Paspor TKI
5.	Rekomendasi bantuan program dan peralatan pelatihan
6.	Izin Penampungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTKI)
7.	Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
SEKTOR PENDIDIKAN	
1.	Izin Taman Penitipan Anak (TPA)
2.	Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
3.	Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis
4.	Izin Operasional SD
5.	Izin Operasional SMP
6.	Izin Kelompok Bermain (KB)
7.	Izin Taman Kanak-kanak (TK)
8.	Izin Lembaga Kursus Pelatihan
SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	
1.	Izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
2.	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup
3.	Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
4.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
5.	Izin Pembuangan Air Limbah
6.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
8.	Rekomendasi IPAL/IPLC
9.	Rekomendasi TPS B3
10.	Izin Transporter Pengangkutan Sampah (Non B3)
SEKTOR PEMBANGUNAN	
1.	Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) Jasa Konstruksi
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
5.	Keterangan Rencana Kota (KRK)
6.	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
7.	Rekomendasi TABG
8.	Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi
SEKTOR PERIKANAN	
1.	Pelayanan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan di Perairan Umum Daerah dan Air Payau
2.	Rekomendasi Surat Keterangan Pengelolaan hasil Perikanan (SKPHP) Skala Mikro
3.	Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan (TDUPHP) Skala Mikro
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
1.	Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi untuk Peternak
2.	Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi bidang Pertanian
3.	Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi bidang Perhubungan
4.	Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi bidang Usaha Mikro
SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN	
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam
2.	Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
3.	Izin Pembukaan Kantor Kas
SEKTOR PETERNAKAN DAN PERTANIAN	
1.	Tanda Pendaftaran Penjualan Daging

2.	Tanda Daftar Usaha Bidang Peternakan (TPUBP)
3.	Izin Usaha Pemotongan Hewan/Ternak/Unggas
4.	Izin Usaha Pengolahan Hasil Peternakan
5.	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan (IKH)/Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH)
6.	Rekomendasi Teknis Untuk Penambahan Unit Usaha di Bidang Pertanian
7.	Izin Pemasukan dan Pembuatan Pakan Ternak
8.	Izin Usaha Peternakan
9.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan
10.	Izin Praktek Dokter Hewan & Dokter Hewan Konsultasi
11.	Izin Usaha Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
12.	Izin Usaha Pelayanan Medik Veteriner (SIVET)
13.	Izin Usaha Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan
14.	Izin Usaha Poultry Shop
15.	Izin Usaha <i>Pet Shop</i>
16.	Izin Operasional Pest Control
17.	Izin Usaha <i>Pet Salon/Grooming</i>
18.	Rekomendasi Pemasukan Hewan dan/atau produk Asal Hewan
19.	Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak
20.	Rekomendasi Pengeluaran Produk Asal Hewan
21.	Sertifikat Kesehatan Hewan
22.	Sertifikat Kesehatan Produk Asal Hewan
23.	Rekomendasi Teknis Pra Nomor Kontrol Veteriner (Pra NKV)
24.	Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi untuk Peternak
25.	Rekomendasi Pembelian BBM bersubsidi bidang Pertanian
26.	Izin Usaha Holtikultura
SEKTOR PERTANAHAN	
1.	Izin Lokasi
2.	Izin Peralihan Hak diatas Lahan HPL Pemko
3.	Perubahan Dokumen Alokasi Lahan
SEKTOR PUBLIK	
1.	Rekomendasi Penelitian
2.	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI